

**ANALISIS BELANJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh
ANGGA PRAYUDA
NIM. 57967/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS BELANJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Angga Prayuda
TM/NIM : 201057967
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, 30 Januari 2014

Diketahui Oleh,
Ketua Program Diploma III



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS BELANJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Angga Prayuda

TM/NIM : 2010157967

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 30 Januari 2014

Tim Penguji,

Nama

Tanda Tangan

Ketua Halkodri Fitra, SE, MM, Ak



Anggota Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak



Anggota Mayar Alriyenti, SE, M.Sc



ABTRAK

ANGGA PRAYUDA : Analisis Belanja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE. MM. Ak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap belanja Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja antara belanja operasi dengan belanja modal dan belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dan analisis efisiensi belanja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran belanja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang realisasi anggaran belanja dan pengelolaan anggaran belanja dengan teknis analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis varians terdapat selisih belanja dengan realisasi, dimana anggaran belanja terserap 87,27% dari APBD dan memiliki selisih belanja dengan realisasi belanja dengan rata-rata 12,73%, analisis pertumbuhan belanja tahun 2010-2012 mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan 13,67%, analisis keserasian belanja tahun 2010-2012 antara belanja operasi dan belanja modal menunjukkan rasio sebesar 91,47% dan 8,53%, Sedangkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan rasio sebesar 89,03% dan 10,97%, dan analisis efisiensi belanja pada tahun 2010-2012 realisasi belanja terhadap efisiensi belanja adalah 87%..

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah rabbi' alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Belanja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat”. Shalawat beserta Salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Salallahu ‘alaihi wassalam, keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam Penyelesaian Tugas Akhir ini, tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah berpartisipasi menyumbangkan waktu, pikiran, bantuan dan motivasi kepada penulis, sehingga banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih Kepada:

1. Bapak Halkadri Fitra, SE. MM sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan arahan, bimbingan dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis

5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Bapak Mansurdin, B.Ac selaku Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
7. Seluruh staf dan pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada Papa, mama, kakak-kakak dan adik-adikku yang tercinta yang selalu memberikan do'a, dorongan dan semangat berupa moril maupun materil.
9. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun demi Perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata Penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Defenisi Anggaran	7
B. Anggaran Sektor Publik	9
1.Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	9
2.Pentingnya Anggaran Sektor Publik.....	11
3.Tujuan dan Manfaat Anggaran Sektor Publik	12
4.Karakteristik Anggaran Sektor Publik.....	13
C. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
1.Pengertian Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.Isi Laporan Realisasi Anggaran.....	15
3.Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	15
D. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	16
1.Pendapatan Daerah	16
a. Pendapatan Asli Daerah.....	17
b. Belanja Daerah	18
c.Pembiayaan Daerah	21
E. Penyusunan Rancangan APBD	22
1.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	23

2.Kebijakan Umum APBD	25
3.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	26
4.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.....	27
5.Penyiapan Raperda APBD.....	30
4.Penetapan APBD	32
E. Analisis Belanja	34
1.Analisis Varians Belanja	34
2.Analisis Pertumbuhan Belanja.....	35
3.Analisis Keserasian Belanja	36
4.Analisis Efisiensi Belanja	37
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Rancangan Penelitian	39
D. Teknis Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	43
1. Dasar Hukum Pembentukan	43
2. Struktur Organisasi	47
3. Tugas dan Fungsi.....	51
4. Visi dan Misi	57
B. Perhitungan dan Analisis Belanja.....	59
1.Analisis Varians Belanja	59
2.Analisis Pertumbuhan Belanja.....	59
3.Analisis Keserasian Belanja	61
4.Analisis Efisiensi Belanja	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Varians Belanja Tahun 2010-2012.....	59
2. Pertumbuhan Belanja Tahun 2009-2012.....	60
3. Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2010-2012.....	62
4. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2010-2012.....	63
5. Efisiensi Tahun 2010-2012.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.Tahapan Penyusunan APBD.....	23
2.Struktur Organisasi Setwan DPRD	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran belanja negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian anggaran (*budget*) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Di Indonesia anggaran belanja negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun dengan undang-undang. APBN pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas, transparan), dan kewajaran. Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi.

Di Indonesia ketentuan mengenai APBN terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 yaitu:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang

dandilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu.

Rencana kerja dan anggaran perusahaan merupakan arah dan pedoman kerja sekaligus sebagai alat pengendalian atau pengawasan kegiatan yang dijalankan. Sebagai pedoman dan alat pengendalian maka rencana kerja dan anggaran perusahaan harus disusun dengan melibatkan seluruh bidang dan fungsi yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut. Instansi pemerintahan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran hal pertama yang dilakukan adalah penyusunan rencana kerja, sedangkan anggaran instansi pemerintahan hanya merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk angka dan uang.

Belanja negara dalam APBN terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain lain. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Begitu pentingnya belanja negara untuk kehidupan masyarakat, maka penyerapan anggaran belanja negara diharapkan dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif. Salah satu sumber pembiayaan belanja negara adalah pinjaman luar negeri yang mempunyai resiko bunga (*interest*), sehingga jika pemanfaatannya tidak maksimal, maka pinjaman luar negeri yang awalnya dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi malahan menjadi beban bagi keuangan pemerintah. Usulan anggaran seringkali menjadi iu penting yang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya organisasi sektor publik berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut sering kali terhambat oleh sumber daya yang terbatas. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran tersebut.

Setiap tahun instansi pemerintah wilayah seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat diberi wewenang menyusun rencana kerja dan anggaran untuk dikirim ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian membahas usulan anggaran tersebut dalam Rakernas bersama-sama dengan pemimpin wilayah untuk melakukan negosiasi anggaran yang diusulkan. Hasil negosiasi antara pemimpin wilayah dan jajaran direksi adalah otorisasi anggaran yang dikelola kantor wilayah. Setiap bulannya kantor wilayah mengirimkan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban ke kantor pusat. Realisasi

anggaran selama satu tahun yang terjadi akan diketahui apakah anggaran yang diusulkan kantor wilayah dengan realisasinya menyimpang jauh atau tidak.

Mengingat pentingnya anggaran belanja didalam instansi pemerintahan maka diperlukan analisis anggaran belanja, agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Adapun setiap tahunnya terjadi perubahan dalam anggaran tersebut, sesuai dengan kebutuhan instansipemerintah yang bersangkutan.

Analisis belanja tersebut digunakan agar kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan belanja tersebut dari tahun ketahunnya seperti, bagaimana selisih belanja, pertumbuhanbelanja, keserasian belanja antara belanja modal dan belanja operasi, belanja langsung dan belanja tidak langsung dan keefesiensian belanja tersebut dari tahun ketahunnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menganalisisanggaran belanjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola belanja dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya, dan dapat mengukur kontribusi

masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim : 2007).

Hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan pengambilan keputusan ekonomi yang lain agar memungkinkan mereka mengalokasikan berbagai sumber daya ekonomis pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah Tugas Akhir yang berjudul : **“Analisis Belanja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana anggaran belanja DPRD Provinsi Sumatera Barat? Jika ditinjau dari:

- a. Analisis varians belanja
- b. Analisis pertumbuhan belanja
- c. Analisis keserasian belanja
- d. Rasio efisiensi belanja

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang analisis belanja di DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2012 ditinjau dari:
 - a. Analisis varians belanja
 - b. Analisis pertumbuhan belanja
 - c. Analisis keserasian belanja
 - d. Rasio efisiensi belanja
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk dapat mengetahui, memahami, dan mengembangkan tentang analisis belanja di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi instansi, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana tukar informasi dan bahan masukan untuk masa yang akan datang.
3. Bagi fakultas, sebagai bahan evaluasi dibidang akademi untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis buat pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Analisis Belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2012 sebagai berikut::

- a. Analisis Varians Belanja pada tahun 2010-2012 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 87% dan memiliki selisih rata-rata 13%. Selisih anggaran belanja dan realisasi tersebut terjadi karena karena adanya penghematan dalam proses pengalokasian dan pengelolaan belanja, karena anggaran belanja merupakan titik atau batasan teakhir dana yang dikeluarkan untuk pengalokasian belanja.
- b. Analisis Pertumbuhan Belanja pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kenaikannya sebesar 13%
- c. Analisis Keserasian Belanja pada tahun 2010-2012 antara belanja Operasi lebih besar dialokasikan dibandingkan Belanja Modal. Begitu jugan dengan Belanja Langsung lebih besar dialokasikan dibandingkan Belanja Tiak Langsung.
- d. Analisis Efisiensi Belanja pada tahun 2010-2012 telah dilakukan dengan efisien karena Efisiensi Belanja pada tahun 2010-2012 dibawah 100% yaitu 87%. Hal itu membuktikan bahwa tidak terjadinya pemborosan pemakaian anggaran belanja.

B. Saran

Dengan adanya rasio perhitungan analisis belanja daerah yang telah dianalisis oleh penulis, maka diharapkan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi dalam pengelolaan anggaran belanja serta lebih melaksanakan anggaran belanja secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Andayani, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta
- Bastian Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*; jakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*; jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; Andi
- Nordiawan Deddy, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*; Jakarta: Salemba Empat
- Nafarin, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958, *tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau*.
- Peraturan Pemerintah Undang – Undang nomor 1 tahun 1945, *penetapan KNID menjadi Badan Perwakilan Rakyat di bawah pimpinan Kepala Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, *tentang penghapusan KNID yang bersamaan dengan dihapuskannya Residen Sumatera Barat*.
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang No 10 tahun 1948, *tentang pembentukan DPR-ST*.
- Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, *tentang pembentukan DPRD-GR dan Sekretariat daerah*.